



Utang DBH Pemprov Riau Rp40,5 Miliar

Laporan AHMAD YULIAR dan
EKA GUSMADI PUTRA,
Selatpanjang
-redaksi@riaupos.co

HINGGA kini utang dana bagi hasil (DBH) Provinsi Riau kepada Meranti mencapai Rp40.500.342.863. Angka tersebut merupakan total dana bagi hasil yang belum dibayarkan sepenuhnya sejak tahun 2012 lalu.

Bupati Kepulauan Meranti Drs Irwan Nasir MSi, Selasa (26/8) menuturkan pihaknya sangat mengharapkan Pemprov Riau dapat

merealisasikan piutang dana bagi hasil Provinsi Riau itu. Sehingga dapat menambah kekuatan anggaran daerah untuk melakukan pembangunan.

"Memang Pemerintah Provinsi Riau masih berutang sebesar Rp40 miliar lebih kepada pemkab dari anggaran bagi hasil. Kami mengharapkan mereka dapat membayarnya segera," ungkap Irwan kepada *Riau Pos* kemarin.

Dari data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Kepulauan Meranti, secara rinci utang bagi hasil Provinsi Riau itu meliputi sisa bagi hasil tahun 2012 sebesar Rp21.198.745.539 yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor dan lainnya. Kemudian ditambah sisa bagi hasil tahun 2013 sebesar Rp17.579.259.357 dan ditambah izin usaha periklanan sebesar Rp2.467.500.

"Kami berharap pemprov bisa mengangsur utang tersebut pada tahun ini. Karena bukan hanya utang pada

tahun lalu (2013) saja, tapi juga terdapat utang dari tahun 2012 lalu," ungkapnya.

Bupati menjelaskan kondisi Meranti yang masih giat melakukan pembangunan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Apalagi kekurangan infrastruktur di sana-sini masih banyak terjadi seperti pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya.

Sebelumnya saat kunjungan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Joni Irwan ke Selatpanjang

beberapa waktu lalu mengakui memang utang bagi hasil Pemerintah Provinsi Riau itu. Kepada *Riau Pos* dia memang menginginkan pembayaran bagi hasil itu dapat dilakukan segera.

"Ya kami maunya dibayar cepat dan tidak menumpuk. Tapi yang membayarkan bagi hasil itu adalah Biro Keuangan, bukan kami. Kami hanya melakukan pemungutan saja dan menghitung berapa bagian daerah. Namun yang membayarnya ke daerah bukan kami," tegas Joni Irwan.

Transfer DBH Berproses

Terkait utang dana bagi hasil (DBH) Provinsi Riau yang masih tersisa di kas daerah (kasda) salah satunya kepada Kabupaten Kepulauan Meranti, pembayaran melalui transfer tetap akan dilakukan. Hanya saja semuanya berproses.

Sehingga Pemprov Riau mengharapkan daerah yang masih kurang pengirimannya diminta untuk menagih dengan memasukkan surat sesuai jumlah yang diperuntukkan. Menurut Kepala Biro Keuangan Setdaprov

Riau, Jonli menyebut memang sedang proses.

"Nanti kami salurkan, yang jelas akan ditransfer. Angka untuk daerah itu tak ingat saya," ujarnya ketika dikonfirmasi.

Hanya saja untuk DBH 2014 diakuinya sudah dilakukan transfer untuk triwulan I dan II ke kas daerah Pemkab Meranti. Untuk kemudian nantinya triwulan III dan IV juga akan diproses sambil menunggu sisa dari 2012 dan 2013 yang disebutkan pemkab setempat. (hen)